BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung, Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten berdiri. Kabupaten berdiri sejak sekitar pertengahan abad ke- 17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung yang beribukota di Bojong Asih (sekarang Dayeuh Kolot), kira-kira 11 km kearah selatan pusat Kota Bandung sekarang. Ditempat itu pemerintah Kabupaten Kota Bandung berlangsung hingga awal abad ke-19. Bupati yang memerintah kabupaten di Krapyak berjumlah 6 orang secara turun temurun yaitu, Tumenggung Wiraangunangun (hingga tahun 1681), Tumenggung Ardi Kusumah (1681- 1704), Tumenggung Anggadiredja I (1704-1747), Demang Natapradja bergelar Tumenggung Anggadiredja II (1714-1763), Tumenggung Anggadiredja III alias R.A Wiranatakusumah I (1763-1794), dan R.A Wiranatakusumah II (1794-1829). *(Volks Almanak Soenda 1922 dan Encyclopaedie Van Nederlandsch – Indie 1927 : 355-358).*

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh A Wiranatakusumah II atau pada akhir 1799 kekuasaan kompeni di Nusantara berakhir sebagai akibat *VOC* bangkrut, kekuasaan di Nusantara diambil alih pemerintah kerajaan Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Perancis. Pemerintahan di Nusantara dilaksanakan oleh perwakilan kerajaan Belanda dengan nama Pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal pertama yaitu Herman Willem Daendels

(1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Daendles membangun Jalan Raya Pos (*De Grote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Panarukan di ujung Jawa Timur (1000 Km), pembangunan itu dilakukan oleh rakyat dengan kerja rodi (kerja paksa).

Di daerah Priangan jalan raya pos mulai dibangun pertengahan 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada di daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parayakan Muncang, ternyata daerah itu berjauhan dengan Ibukota Kabupaten. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintahan kolonial Belanda mudah mendatangani kantor Bupati, Daendels melalui suratnya tanggal 25 Mei 1810 meminta kepada kedua Bupati yang bersangkutan agar memindahkan Ibukota Parakan Muncang ke Andawak (daerah Tanjungsari sekarang).

Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar Bupati Bandung sudah merencanakan memindahkan Ibukota Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan yang terletak di tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun.Alasan pemindahan Ibukota itu karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak disisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyat pindah mendekati lahan bakal Ibukota baru.Mula-mula Bupati tinggal di

Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang) kemudian pindah ke Balubur hilir agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah ideyatoya membangun "kota". Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari sungai Cikapundung, maka Bupati pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung di bangun akan tetapi itu di bangun bukan atas prakarsa Daendels melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati RA Wiranatakusumah II adalah pendiri Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai Ibukota baru Kabupaten dengan Belsuit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan Validitasnya sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".

Tanggal hari jadi Kota Bandung telah disahkan oleh DPRD Kota Bandung dalam Perda (Peraturan Daerah) No.35 Tahun 1998 dengan demikian tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya (sebelum tahun 1998) biasa diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Bandung bukan lagi sebagai hari jadi Kota Bandung, karena tanggal 1 April 1906 ternyata adalah tanggal pembentukan *Gemeente* Bandung (sekarang Pemerintahan Kota Bandung).

Sejak Kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864, Kota Bandung hanya berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten.Kota itu sepenuhnya diperintah oleh RA Wiranatakusumah II dan dilanjutkan oleh RA Wiranatakusumah III (1829-1846) dan RA Wiranatakusumah IV tepatnya tanggal 7 Agustus 1846.Kota Bandung juga berfungsi sebagai Ibukota Karesidenan Priangan menggantikan

Kota Cianjur yang rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede. Dengan demikian, sejak itu di Kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsung Pemerintahan Kabupaten (Pemerintah Tradisional) dan Pemerintahan Karesidenan (Pemerintah Kolonial), hal ini berlangsung sampai Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut *Gemeente* (1 April 1906).

Gemeente Bandung dibentuk pada waktu Kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 yaitu R.A.A Martanegara (1893-1918) pengganti Bupati R.A Kusuma Dilaga (1874-1893). Dengan berdirinya daerah *Gemeente* sebagai pemerintahan yang bersifat otonom, lebih dominan dari pada kedua pemerintahan lain di Kota Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah *Gemeente,* namun dalam prakteknya Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagai anggota dewan kota (*Gemeente*Road)

Sejak tanggal 1 Oktober 1962 sebutan *Gemeente* berubah menjadi *Stads Gemeente* yang berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia- Belanda pada masa pandudukan Jepang (Maret 1924- 14 Agustus 1945) pemerintahan Kota Bandung disebut Bandung Shi. Pada masa kemerdekaan, sebutan Kota Bandung berubah-ubah sebagai berikut:

a. Haminte Bandung

Dari 24 April 1948- 11 Maret 1950 (masa Negara Pasundan dibawah RIS)

b. Kota Besar Bandung

Sejak 15 Agustus 1945

c. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokokpemerintahan daerah hingga tahun 1998.

d. Pemerintah Kota Bandung

Sejak tahun 1999 sampai sekarang. Berikut nama-nama Walikota Bandung dari tahun 1906 sampai sekarang:

1. E.A Maurenbrecher (1906- 1907)
2. R.E Krijgboom (1907-1908)
3. J.A Van Darent (1908-1909)
4. J.J Verwjik (1910-1912)
5. CCB Van Vlenter & BK Van Bijleved (1912-1913)
6. B.Coops (1913-1920) untuk pertama kalinya
7. S.A. Ritsna (1920-1921)
8. B.Coops (1921-1928) untuk kedua kalinya
9. IR. J. E A Van Wolsogen Kuhr (1918-1934)
10. MR. J. M. Wesselink (1934-1936)
11. N. Beets (1936-1942)
12. RA Atmadinata (1942-1945)
13. R. Sjamsoerizal (1945-1946)
14. IR. Oekar Bratakoesoemah (1946-1949)
15. R. Enoch (1949-1956)
16. R. Priatna A. Koesoemah (1956-1966)
17. R. Didi Djukardi (1966-1968)

18. Hidayat Soekarma Didjaya (1968-1971)
19. R. Djundjunan (1971-1976)
20. H. Utju Djoenadi (1976-1978)
21. R. Husein Wangsa Atmaja (1978-1983)
22. H. Ateng Wahyudi (1983-1993)
23. Wahyu Hamidjaya (1993-1998)
24. AA Tarmana (1998-2003)
25. Dada Rosada (2003-sekarang)

1.1 Visi dan Misi Kota Bandung

- **Visi Kota Bandung**

Visi Kota Bandungadalah Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat).

Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam Visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut, yaitu:

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit masyarakat yang bertentangan dengan moral, agama, dan budaya bangsa.
2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.

3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat, terhadap agama, hukum, aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota.
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

- **Misi Kota Bandung**

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja.
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta barhati nurani yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenegakerjaan, kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda, dan olahraga serta kesetaraan gender (jenis kelamin).
4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan kota.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, yang mencakup pemberdayaan pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.2 logo dan arti

Gambar 1.1

Lambang Kota Bandung



Sumber : www.google.com Juni 2012

Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Bandung Tahun 1953, tanggal 8 Juni 1953, yang dnzinkan dengan Keputusan Presiden tanggal 28 April 1954 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1954 No. 4 Lampiran No. 6. Lambang tersebut bertokoh **Perisai** yang berbentuk **Jantung**. Perisai itu terbagi dalam dua bagian oleh sebuah **Balok-Lintang** mendatar bertajuk

empat buah, yang berwama Hitam dengan pelisir berwama **Putih (Perak)** pada pinggir sebelah atasnya:

a. Bagian atas latar **Kuning (Emas)** dengan lukisan sebuah **Gunung** berwama **Hijau**, yang bertumpu pada balok-lintas.
b. Bagian bawah latar **Putih (Perak)** dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak, yang berwama **Biru**.

Di bawah perisai itu terlukis sehelai **Pita** berwama **Kuning (Emas)** yang melambai pada kedua ujungnya. Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwama **Hitam** amsal dalam bahasa **Kawi**, yang berbunyi: **Gemah Ripah Wibawa Mukti**.

Wama-wama yang dipergunakan untuk pelbagai lukisan pada perisai itu mempunyai arti yang dalam dan lazim dipakai di seluruh dunia untuk membuat lambang-lambang sehingga *Heraldisch* dapat dipertanggungjawabkan.

Kuning (Emas) : Kesejahteraan, Keluhungan.

Hitam (Sabel) : Kokoh, Tegak, Kuat

Hijau (Sinopel) : Kemakmuran, Sejuk

Putih (Perak) : Kesucian

Biru (Azuur) : Kesetiaan

Gemah Ripah Wibawa Mukti : Tanah Subur Rakyat Makmur

Kesimpulannya, segala sesuatu memperlambangkan Kota Bandung yang terletak pada suatu tanah datar yang subur dan makmur dengan iklimnya yang sejuk, yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani,

dikelilingi oleh suatu rangkaian gunung-gunung dan bukit-bukit dalam mana Gunung Tangkuban Perahu mengambil peranan yang penting, dengan pemandangan alamnya yang indah dan permai.

1.3 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAKOMINFO (Badan Komunikasi dan Informatika) KotaBandung merupakan Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantordi lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi danKomunikasi dengan kantor pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengandemikian Bakominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas DaerahKota Bandung.

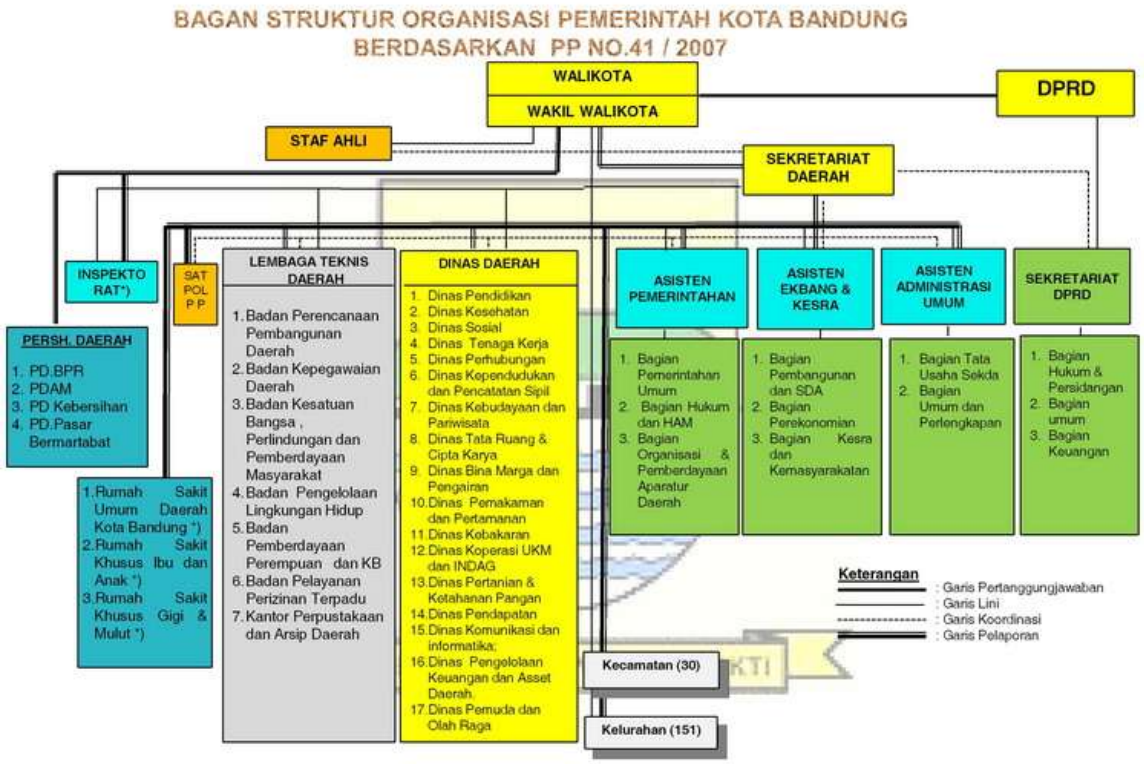
Dengan diterbitkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor :13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung No. 13 Tahun2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahuntentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota BandungTanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan Informatika KotaBandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)Kota Bandung.

1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Berikut ini adalah Struktur Organisasi pada Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung



Sumber : DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2012

1.5 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu struktur organisasi.Berikut ini adalah Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung :

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber : DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung, 2012

1.5*Job Descriptions* Dinas Komunikasi dan Informatika

- **Kepala dinas**

  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

- **Sekertariat**

  Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengerahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariat dan mengendalikan tugas-tugas bidang.

- **Sub bagian umum dan kepegawaian**

  Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas pokok membantu sekertaris merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

- **Sub bagian keuangan dan program**

  Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok membantu sekertaris melaksanakan sebagian tugas sekertariat lingkup keuangan dan program.

- **Bidang pos dan telekomunikasi**

  Bidang pos dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekomunikasi.

- **Seksi pengendalian pos dan telekomunikasi**

  Seksi pengendalian pos dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bidang pos dan telekomunikasi lingkup pengendalian pos dan telekomunikasi.

- **Seksi pemberdayaan pos dan telekomunikasi**

  Seksi pemberdayaan pos dan telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pos dan telekomunkasi lingkup pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

- **Bidang telematika**

  Bidang telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas komunikasi dan informatika lingkup telematika.

- **Seksi sarana dan prasarana telematika**

  Seksi sarana dan prasarana telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang telematika lingkup sarana dan prasarana telematika.

- **Seksi *e-Government* dan pemberdayaan telematika**

  Seksi e-Government dan pemberdayaan telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang telematika lingkup e-Government dan pemberdayaan telematika.

- **Bidang desiminasi informasi**

  Bidang desiminasi informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas komunikasi dan informatika lingkup desiminasi informasi.

- **Seksi pengolahan data dan informasi**

  Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang desiminasi informasi lingkup pengolahan data dan informasi.

- **Seksi komunikasi dan multimedia**

  Seksi komunikasi dan multimedia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang desiminasi informasi lingkup komunikasi dan pengaduan masyarakat.

- **Bidang hubngan masyarakat**

  Bidang hubungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas komunikasi dan informatika lingkup hubungan masyarakat.

- **Seksi peliputan dan dokumentasi**

  Seksi peliputan dan dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang hubungn masyarakat lingkup peliputan dan dokumentasi.

1.6 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada dalam Diskominfo, diantaranya:

Tabel 1.1

Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	**GEDUNG**	**1**	**BAIK**
2.	**TOILET**	**2**	**BAIK**
3.	**RUANG KERJA**	**5**	**BAIK**
4.	**KANTIN**	**1**	**BAIK**
5.	**MUSHOLA**	**1**	**BAIK**
6.	**DAPUR**	**1**	**BAIK**

Sumber : Catatan Harian Penulis Selama PKL, 2012

Tabel 1.2

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	MEJA	3	BAIK
2.	KOMPUTER	2	BAIK
3.	SCANER	1	BAIK
4.	PRINTER	1	BAIK
5.	KURSI LIPAT	5	BAIK
6.	TELEPON	1	BAIK
7.	LEMARI RAK	1	BAIK
8.	DISPENSER	1	BAIK

Sumber : Catatan Harian Penulis Selama PKL, 2012

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi Informatika Pemerintah Kota Bandung,

Alamat : Jalan Wastukancana No.2 Bandung

Telepon/fax : (022) 4234892

Email : humas_bandung@yahoo.com

Website : www.**bandung**.go.id

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Waktu Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 08.00 sampai dengan 15:00 WIB. Dimulai pada tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012